

TREN PRODUKSI KAYU BULAT IUPHHK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PNBP SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI PAPUA

*(Trend of Rounded Wood Production from IUPHHK and its Contributions towards
PNBP Receipt of Forestry Sector in Papua Province)*

AGUSTINUS B. ARONGGEAR¹, WAHYUDI², ANTONY UNGIRWALU²✉

¹Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jl. Tanjung Ria Base G Jayapura Papua 99771

²Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314.

Tlp/Fax: +62986211065.

✉Penulis Korespondensi: Email: a.ungirwalu@unipa.ac.id

Diterima: 17 Juni 2021 | Disetujui: 24 Juli 2021

Abstrak. Hutan alam telah menjadi primadona bagi pendapatan negara sejak masa orde baru dan menjadi urutan terbesar kedua setelah sektor migas. Sistem pengelolaan *timber management* (TM) melibatkan sektor swasta melalui kehadiran HPH (Hak Penguasaan Hutan) atau yang dikenal saat ini dengan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Dalam perkembangannya kehadiran HPH/IUPHHK terus mengalami perubahan di provinsi Papua sesuai dengan kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia. Merosotnya produksi kayu bulat hutan alam mengancam penurunan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor kehutanan terutama melalui realisasi pembayaran tarif PSDH dan DR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tren produksi kayu bulat IUPHHK aktif dan kontribusinya terhadap pendapatan PNBP sektor kehutanan di Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif melalui teknik wawancara semi struktural dan diskusi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya produksi kayu bulat dan evaluasi penerimaan iuran PSDH, DR, dan IUPHHK pada pemegang izin IUPHHK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren produksi kayu bulat (m³) periode 2014 – 2019 bervariasi dimana nilai produksi tertinggi terlihat pada tahun 2015 dengan total realisasi produksi sebesar 1,163,665 m³. Sementara penerimaan PNBP dari periode 2014-2019 terlihat cukup tinggi pada tahun 2015. Perusahaan dengan kontribusi PNBP tertinggi terdapat pada PT. Jati Dharma PI. Hasil analisis tren regresi sederhana antara penerimaan dan produksi kayu bulat masih terlihat cukup positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15 persen. Diharapkan dari kajian ini memberikan informasi aktual terkait dampak perubahan regulasi tarif DR dan PSDH yang berpengaruh terhadap pendapatan sektor kehutanan di Papua.

Kata kunci: Tren produksi, kayu bulat, PNBP, IUPHHK, Papua

Abstract. Natural forest has been excellence for generating country incomes since several decades ago and become the second biggest income sector in Indonesia after oil and gas. Management system of *timber management* has involved non-government through the presence of forest concessions or commonly known as IUPHHK. Over period of time, the presence of the IUPHHK is changing overtime in Papua Province in line with forest policy management in Indonesia. Decline of rounded wood production from natural forest threatens PNBP receipt from forestry sector in particular through the

payment realization rate of reforestation fund and provision of forest resource fund. This study aimed at understanding the production trend of rounded wood production in IUPHHKs and its contribution towards PNBP receipt of forestry sector in Papua Province. Method applied in the study was descriptive by way of semi-structural interview and discussion in conjunction with factor that affecting the continuity of rounded wood production and the evaluation of PSDH, DR, and IIUPH dues subjected to IUPHHK holders. The results pointed out trend of rounded wood production (m^3) for the period of 2014-2019 was fluctuated in which the highest has been noted in 2015 with a total of rounded wood production 1.163.665 m^3 . moreover, PNBP receipt from 2014-2019 has been indicated high in 2015. Concessions with the highest PNBP contribution was PT. Jati Dharma PI. The simple analysis result of production trend between receipt and rounded wood production was quite positive with the average growth of 15 percent. It has been expected from the study to provide the actual information regarding the impact of regulation changes on DR and PSDH dues rate that affecting the income of forestry sector in Papua.

Key words: *Tend of production, rounded wood, PNBP, IUPHHK, Papua*

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi penduduk yang relatif cukup besar dan terletak di kawasan hutan tropis dunia, Indonesia menjadi penting dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya hutan tropis dan ekosistemnya (Byron and Arnold, 1997). Pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara komersial telah dilakukan sejak tahun 1960-an melalui kebijakan regulasi pemberian izin penanaman modal asing yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (Syafrani dkk., 2017).

Selama tiga dekade di periode 1970-1990 masa Orde Baru, terdapat 652 HPH yang mengakses hutan alam seluas 69 juta ha (48%) dari luas hutan Indonesia saat itu mencapai total luas 134 juta ha. Konsesi tersebut mampu memproduksi 20-30 juta m^3 kayu pertahunnya. Suatu hasil yang begitu besar dan berkontribusi terhadap sektor pendapatan tunai negara saat itu, dimana sektor kehutanan menempati urutan kedua setelah minyak dan gas dengan menghasilkan sekitar US\$ 3,5 miliar per tahunnya (Barr et al., 2006) sekaligus menjadi

tulang punggung negara pada saat itu (Singer, 2008).

Hingga kini masih terlihat jelas berbagai bentuk pengelolaan sumber daya hutan melalui pemberian ijin konsesi hutan di beberapa kawasan potensial di Indonesia. Sumber utama seperti kayu masih menjadi target pengelolaan hutan di Indonesia, disamping beberapa produk bukan kayu (HHBK) kian terus dikembangkan sebagai komoditas potensial dengan nilai ekonomi yang tinggi (Prasetyo dkk., 2017). Secara umum, kegiatan pengelolaan hutan dan kayu secara komersial masih terus akan berlanjut hingga sekarang walaupun terjadi fluktuasi dan dinamika dengan adanya penurunan pendapatan dari sektor kehutanan yang terlihat melalui penurunan nilai produk domestik bruto (PDB) kehutanan yang hanya mencapai 1,2% selama kurun waktu satu dekade terakhir (Syafrani dkk., 2017).

Namun keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hutan akan terus dilakukan mengingat sangat strategis dalam pengembangan ekonomi nasional Indonesia. Telah terlihat bahwa sektor kehutanan juga menjadi penyumbang devisa nasional disamping sektor pertambangan dan ikut memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan penyerapan tenaga

kerja secara nasional (Erwinsyah, 2017). Selanjutnya tercatat kontribusi sektor kehutanan sebesar US\$ 7,3 miliar selama periode 1980 – 2002 yang diperoleh dari dua sumber yaitu berupa pungutuan iuran hasil hutan dan dana reboisasi (Ulya dan Yunardy, 2006). Dengan prospek nilai ekonomi yang diberikan terhadap kontribusi regional dan nasional, maka pengelolaan hutan secara komersial akan terus diusahakan namun dengan pengelolaan yang lebih efisien dan efektif mengingat dampak kerusakannya yang semakin besar.

Provinsi Papua secara langsung berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan melalui izin kegiatan konsesi yang diberikan. Sebagai salah satu kawasan dengan sumber daya hutan yang masih luas (31,2 juta Ha) dan potensial di Indonesia, Papua turut berkontribusi dalam sektor kehutanan dengan hadirnya izin pemanfaatan hutan dan kayu melalui kebijakan pemerintah yang hingga di tahun 2018, tercatat sebanyak 27 pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) sedangkan yang masih aktif sampai tahun 2018 sebanyak 12 IUPHHK. Kehadiran izin konsesi ini tentunya akan berdampak terhadap peningkatan nilai ekonomi nasional dan secara khusus ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tataran wilayah provinsi dan kabupaten di seluruh Papua (Tokede dkk., 2005; Kuswandi dkk. 2015).

Sejauh ini pengelolaan hutan lestari di Papua tampak begitu kontras ketika fokus pengelolaan hutan di Papua masih lebih diarahkan pada liberalisasi industri dengan paradigma *timber management* dimana kayu sebagai produk primernya. Provinsi Papua dengan luasan hutan yang besar dan potensial sebagai penghasil sumber daya kayu telah menjadi ladang investasi sektor kehutanan dengan hadirnya puluhan izin konsesi. Sebanyak kurang lebih 27 izin telah diberikan dalam bentuk HPH/IUPHHK dengan total luasan mencapai

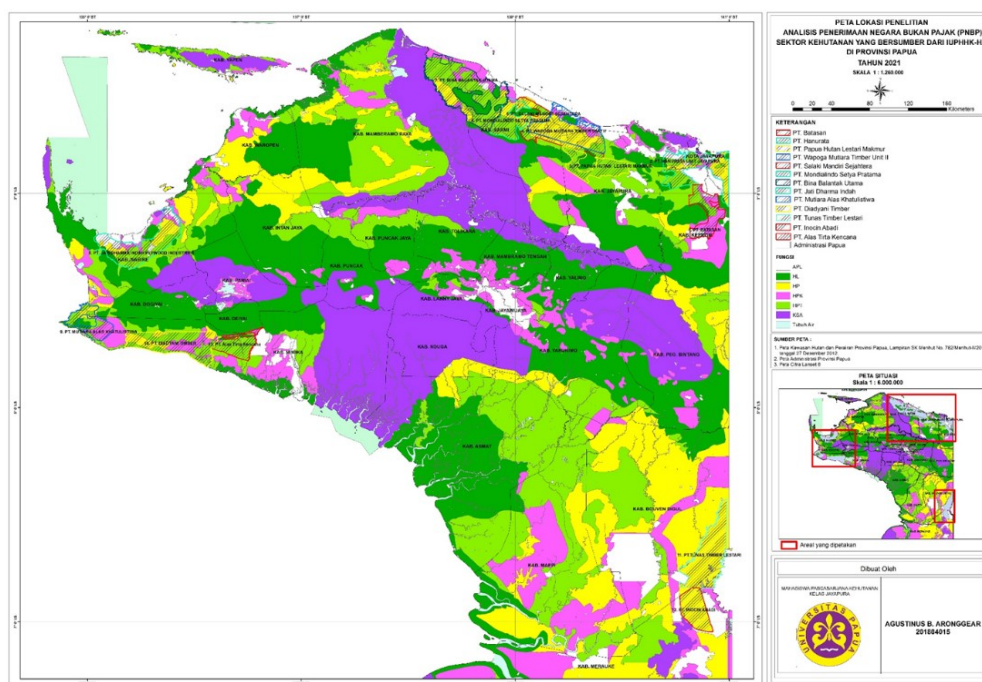
4,3 juta Ha yang tersebar pada 17 kabupaten di Provinsi Papua.

Evaluasi dan monitoring terhadap pendapatan dari iuran PSDH, DR dan IIUPH menjadi sangat penting guna mengontrol kontribusi sektor kehutanan kepada daerah sesuai aturan yang berlaku khususnya dalam melihat pelaksanaan sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*) merupakan cara mengelola hutan untuk produksi kayu tanpa mengurangi kualitas primer dan produktivitas masa depan dan dipandang sebagai bagian penting dari keberlangsungan suplai kayu, perlindungan keanekaragaman hayati dan peningkatan pendapatan di hutan tropis.

Merosotnya produksi kayu bulat hutan alam mengancam penurunan PNPB sektor kehutanan. Untuk mengantisipasi penurunan PNPB, pemerintah kemudian berusaha menaikkan besarnya tarif PSDH dan DR. Berangkat dari kondisi ini, maka dirasa perlu untuk mengkaji secara detail terkait produksi kayu bulat dan kompensasi dana PSDH, DR, dan IIUPH secara berkala kepada setiap pemegang izin HPH/IUPHHK yang berstatusnya aktif beroperasi di Provinsi Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tren produksi kayu bulat IUPHHK aktif dan kontribusinya terhadap pendapatan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sektor kehutanan di Provinsi Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Obyek hutan yang dikaji adalah hutan negara pada hutan alam produksi yang dikelola berdasarkan ijin UPHHK di Provinsi Papua (Gambar 1). Penelitian berlangsung selama $\pm$ 2 bulan terhitung mulai dari bulan akhir Februari hingga April tahun 2021.



Gambar 1. Lokasi Obyek Penelitian

Alat dan Alat

Dalam rencana penelitian ini bahan yang akan digunakan antara lain *tally sheet* data evaluasi produksi dan iuran serta kuisioner berupa daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak perusahaan mengacu pada indikator kriteria dan indikator penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari. Sementara alat yang digunakan antara lain peralatan tulis menulis dan komputer guana analisis data.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif melalui teknik wawancara semi struktural dan diskusi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya produksi kayu bulat dan evaluasi penerimaan iuran PSDH, DR, dan IIUPH pada pemegang izin HPH/IUPHHK. Idealnya penelitian dilakukan pada semua pemegang ijin IUPHHK di Provinsi Papua, namun dalam penelitian ini kondisi ideal karena terkait ketersediaan data

sehingga difokuskan pada 12 IUPHHK-HA dengan status aktif sebagai sampel penelitian ini. Pemilihan dari sebanyak 12 IUPHHK dari yang masih aktif wilayah Papua terletak di bagian selatan dan Papua bagian utara.

Variabel Pengamatan

Dalam penelitian ini, variabel yang akan dilihat antara produktivitas kayu bulat pada masing-masing IUPHHK-HA serta komponen penyebab adanya variasi penerimaan tahunan terhadap iuran kehutanan berupa PSDH, DR, dan IIUPH kepada negara.

Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan melalui proses wawancara dan diskusi kepada responden yang secara purposif di pilih antara lain Kepala Dinas Kehutanan provinsi Papua, kepala bidang Pembinaan Usaha Kehutanan, kepala bidang Produksi dan beberapa bidang terkait yang

secara aktif berperan dalam produksi kayu bulat dan penerimaan retribusi iuran PSDH, DR, dan IIUPH. Disamping itu diskusi melalui pertanyaan pada kusioner kepada pihak manajemen perusahaan antara lain: yang diambil secara purposive guna sinkronisasi informasi dan pemutahiran data untuk tren produksi kayu bulat dan iuran PNPB yang diberikan melalui hadirnya izin konsesi di Provinsi Papua.

Penelitian ini akan menggunakan basis data produksi kayu bulat dengan *range* data perbulan (Januari - Desember) dan data iuran berupa PSDH, DR, dan IIUPH yang diberikan dengan basis data per triwulan dalam kurun waktu lima tahun yang dihitung mulai dari tahun 2014 hingga 2018. Data ini secara berkala diperoleh dari semua pemegang izin usaha konsesi sebagai kewajiban pelaporan kepada pemerintah. Disamping itu data sekunder lain berupa identifikasi faktor-faktor yang turut mempengaruhi tren produksi kayu bulat dan pencapaian iuran dalam bentuk PSDH, DR, dan IIUPH juga akan dikumpulkan.

Pengolahan dan Analisis Data

Penggunaan metode statistik deskriptif sederhana dilakukan guna melihat nilai produksi dan penerimaan iuran rata-rata, nilai penerimaan iuran produksi tertinggi, dan nilai penerimaan iuran produksi terendah terhadap data produksi serta iuran dan penerimaan iuran selama 5 tahun (2014 - 2018). Analisis data dilakukan dengan membandingkan tren produksi selama setahun (Januari - Desember) dan penerimaan iuran PSDH, DR, dan IIUPH (per triwulan). Sumber data hasil pengumpulan akan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan MS Excel. Data produksi kayu bulat akan diolah dengan berbasis pada data bulanan (12 bulan) guna melihat tren produksi tertinggi dan terendah dalam satu tahun produksi dari beberapa IUPHHK yang masih aktif beroperasi. Sementara data penerimaan iuran PSDH, DR, dan IIUPH diolah dengan basis data per

triwulan guna melihat dinamika dan tren penerimaan 5 tahun (2014 - 2018). Selanjutnya analisis regresi sederhana juga akan dilakukan guna melihat hubungan produksi dan penerimaan iuran selama dalam kurun waktu 5 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu di Indonesia memiliki relasi yang kuat terkait kepemilikan konsesi. Tercatat di Provinsi Papua pada tahun 2020 terdapat 21 ijin IUPHHK yang beroperasi dimana 18 diantaranya merupakan ijin IUPHHK-HA dan tiga lainnya merupakan IUPHHK-HT yang beroperasi di wilayah Merauke (APHI 2020). Masing-masing pemegang ijin memiliki karakter yang berbeda baik dari status ijin dan proses produksi yang dilakukan

Karakteristik Pemegang IUPHHK Aktif di Papua

Pengelolaan hutan di tanah Papua secara keseluruhan merupakan salah satu upaya peningkatan pendapatan negeri yang telah dimulai pada tahun 1970 an melalui pemberian ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Tercatat bahwa hingga saat ini areal hutan dengan fungsi produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan produksi konversi (HPK) yang telah dibebani melalui mekanisme perijinan IUPHHK tercatat seluas 4.387.508 ha dari total luasan hutan Papua $\pm$ 31.228.696 ha yang tersebar hampir di semua kabupaten di wilayah Provinsi Papua. Merujuk pada data terbitan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua tahun 2012 bahwa terdapat sekitar 11 IUPHHK-HA dan 1 IUPHHK-HTI yang masih aktif beroperasi dengan ijin konsesi dan luasan areal konsesi seperti yang tersaji pada Tabel 1. Urain karakteristik IUPHHK pada Table 1 di belum secara menyeluruh terhimpun mengingat pada saat informasi tersebut diperoleh, terdapat beberapa IUPHHK yang masih dalam proses penyelesaian ijin operasi dan proses teknis

lainnya sehingga belum menggambarkan karakteristik perusahaan/IUPHHK secara menyeluruh. Namun bila dibandingkan pada

saat ini, maka terdapat beberapa perubahan jumlah IUPHHK yang aktif dengan status pengelolaan areal konsesi luasan yang berbeda.

Tabel 1. Sebaran dan status perusahaan/IUPHHK yang masih aktif per tahun 2012 di Provinsi Papua

No.	Pemegang IUPHHK/Kabupaten	SK IUPHHK/HPH	Luas (Ha)		Persentase (%)
			IUPHHK	Kabupaten	
1.	PT. Batasan (Keerom)	342/Kpts-II/97	106.643	936.500	16,91
2.	PT. Hanurata Unit Jayapura (Keerom)	SK.601/Menhut-II/2012	56.325		35,59
3.	PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II (Sarmi)	723/Menhut-II/2011	169.170		
4.	PT. Bina Balantak Utama (Sarmi)	SK.365/Menhut-II/2011	298.710		
5.	PT. Mondialindo Setya Pratama (Sarmi)	SK. 466/Menhut-II/2006	94.800		
6.	PT. Salaki Mandiri Sejahtera (Sarmi)	SK. 396/Menhut-II/2006	79.130	1.751.700	5,90
7.	PT. Papua Hutan Lestari Makmur (Jayapura)	334/Menhut-II/2009	103.510		
8.	PT. Jati Dharma Indah PI (Nabire)	96/Kpts-II/97	163.930		
9.	PT. Diadyani Timber (Mimika)	SK. 292/Menhut-II/09	205.160		
10.	PT. Alas Tirta Kencana (Mimika)	649/Kpts-II/95	87.500		
11.	PT. Tunas Timber Lestari (Boven Digoel)	SK. 711/Menhut-II/2010	214.985	2.710.800	7,93
12.	PT. Inocin Abadi (Merauke)	SK. 606/Menhut-II/2011	99.665	4.679.200	2,13

Dari distribusi IUPHHK-HA di masing-masing kabupaten di Provinsi Papua, terlihat jumlah IUPHHK-HA terbanyak beroperasi pada areal hutan Kabupaten Sarmi dengan jumlah mencapai 5 unit ijin pemanfaatan kawasan hutan dengan luasan mencapai 38,48% dari total luasan kabupaten. Sementara pemanfaatan kawasan konsesi secara persentase dengan luasan terkecil berada di Kabupaten Merauke dengan total luasan areal konsesi sebesar 5,75%.

Tren dan Jenis Produksi Pengolahan Kayu Bulat

Data realisasi produksi kayu bulat diperoleh dari sembilan wilayah yang merepresentasikan kehadiran IUPHHK/IPK di Provinsi Papua antara lain Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Merauke, Boven Digoel, Nabire, Mimika, dan Kabupaten Mamberamo Raya.

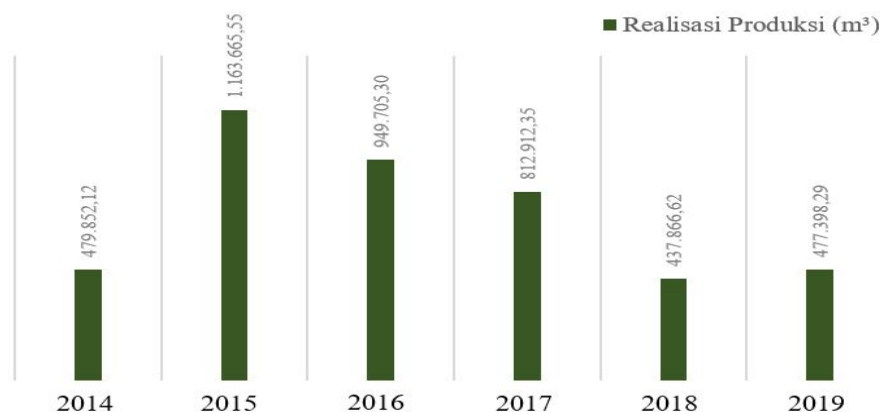
Evaluasi kayu bulat yang ditampilkan pada lampiran 1 mendiskripsikan produksi kayu bulat berdasarkan jenis yang diproduksi antara lain jenis Merbau, jenis Meranti, jenis Rimba Campuran dan jenis Kayu Indah dari beberapa

perusahaan yang masih aktif beroperasi dari tahun 2014 hingga 2019. Terlihat juga bahwa berdasarkan grafik produksi per IUPHHK, PT. Jati Dharma PI memiliki produksi kayu bulat tertinggi (jumlah batang dan volume produksi) dibandingkan IUPHHK lainnya yang aktif beroperasi di Provinsi Papua. Sementara bila dilihat untuk produksi pertahunnya yang merepresentasi produksi tahun 2015 memperlihatkan grafik tertinggi pada hampir semua IUPHHK yang berproduksi.

Namun secara akumulatif, data realisasi produksi kayu bulat yang dikumpulkan yakni dari tahun 2014 hingga 2019 dimana terlihat bahwa dari akumulasi data pertahunnya, telah terjadi fluktuasi nilai total realisasi produksi kayu bulat. Secara parsial, tren data produksi tertinggi terlihat pada realisasi produksi kayu bulat tahun 2015 dengan akumulasi mencapai 1.086.856,83 m³ dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya. Sementara tren produksi realisasi kayu bulat terendah terlihat pada tahun 2018 dengan total akumulasi produksi mencapai

437.866,63 m³. Namun secara keseluruhan, realisasi produksi dari tahun 2014 hingga 2019 cukup bervariasi dimana tidak terlihat tren dan

cenderung realisasi produksi yang terus meningkat maupun yang terus menurun dengan bertambahnya waktu.



Gambar 2. Tren realisasi produksi kayu bulat (m³) per tahun (2014 - 2019) dari representasi perusahaan konsensi IUPHHK/IPH yang aktif di Provinsi Papua (berdasarkan data pada Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua).

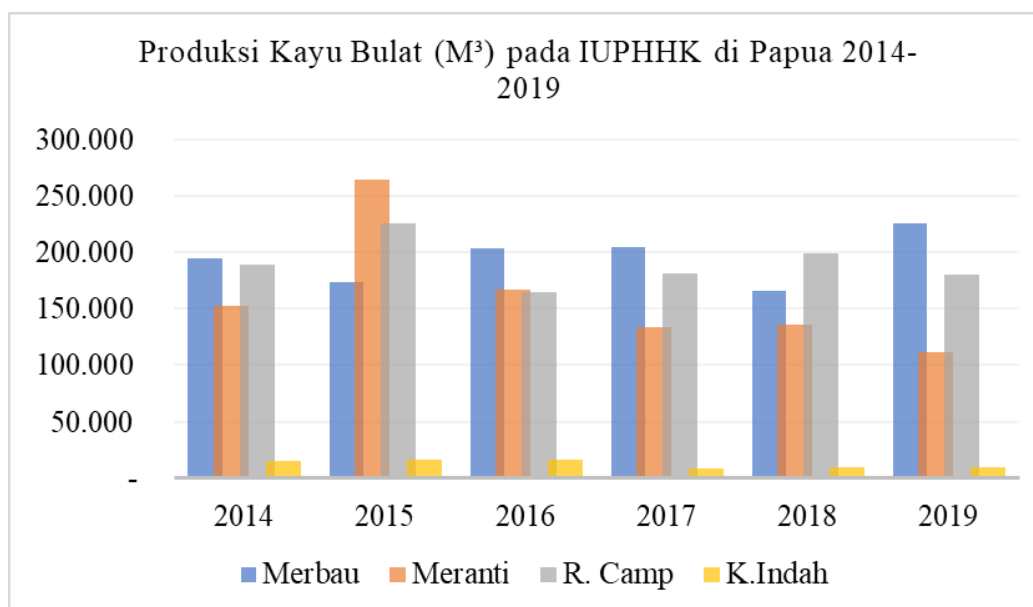
Berdasarkan tren realisasi produksi pertahunnya, terlihat bahwa puncak realisasi terjadi di tahun 2015 dan terendah terjadi di tahun 2018. Tingginya realisasi tahun 2015 kemungkinan didorong oleh beberapa faktor antara lain kondisi perusahaan yang dalam performa terbaik sehingga mendorong optimalisasi produksi kayu bulat pada RKT yang tersedia. Disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa indikasi perubahan kebijakan dan peraturan teknis terkait besarnya biaya realisasi produksi kayu bulat (peralihan dari Per-Men LHK No. 68 tahun 2014 menjadi Per-Men LHK No. 64 tahun 2017) juga berdampak kepada fluktuasi realisasi produksi. Tingginya produksi tahun 2015 kemungkinan belum berlakunya kebijakan baru peningkatan penetapan harga satuan kayu bulat sehingga optimalisasi produksi ditingkatkan di tahun 2015.

Selain itu, tingginya realisasi produksi kayu bulat di tahun 2015 kemungkinan didorong oleh tingginya permintaan produksi turunan kayu

bulat seperti produksi kayu lapis dan kayu gergajian baik untuk pemenuhan dalam negeri dan untuk tujuan ekspor. Menurut Erwinsyah dkk. (2017) bahwa fluktuasi produksi kayu bulat sangat erat hubungannya dengan *demand* dari pasar dimana ketika permintaan meningkat maka akan disesuaikan dengan realisasi produksi kayu bulat, sebaliknya apabila permintaan di pasar kayu lapis dan kayu gergajian menurun maka realisasi produksi kayu bulat dari perusahaan konsensi pun menurun. Selain itu naiknya harga produk kayu lapis dan kayu gergajian serta meningkatnya ekspor dan konsumsi domestik produk *pulp* juga turut mempengaruhi naiknya intensitas produksi kayu bulat di areal konsesi (Suryandari, 2008; Fury, 2008). Meningkatnya realisasi produksi kayu bulat pada tahun 2015 sejalan dengan tingginya produksi beberapa produk turunan kayu gergajian seperti produk panel, *woodworking* dan furnitur di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya dimana untuk produk panel tertinggi terjadi pada tahun 2015

yakni mencapai 2,78 juta m³ dibandingkan tahun 2013 dan 2014 sebesar 2,74 juta m³ dan 3,75 juta m³. Hal ini juga terindikasi pada produk *woodworking* dimana produksi tertinggi terjadi pada tahun 2015 mencapai 1,83 juta m³

dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing sebesar 0,89 juta m³ dan 1,15 juta m³ serta pada tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing mencapai 1,31 juta m³ dan 1,62 juta m³ (Benyamin dkk., 2019).



Gambar 3. Karakteristik produksi kayu bulat berdasarkan jenis kayu, jumlah serta volume produksi pertahunnya (2014 -2019) pada masing-masing IUPHHK yang masih aktif berproduksi di Provinsi Papua.

Evaluasi kayu bulat yang ditampilkan pada Gambar 2 dan Lampiran 1 mendiskripsikan produksi kayu bulat berdasarkan jenis (Merbau, Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah) yang diproduksi oleh 12 perusahaan (Tabel 2) yang masih aktif beroperasi dari tahun 2014 hingga 2019. Berdasarkan produksi kayu bulat per jenis, maka produksi kayu bulat jenis Merbau terlihat mendominasi terhadap rata-rata produksi di tiap IUPHHK per tahunnya, namun tidak signifikan bila dibandingkan dengan produksi jenis kayu lain. Sementara bila dilihat perbandingan rata-rata produksi tahunan (periode 2014 - 2019), maka produksi tertinggi cenderung terjadi pada tahun 2015 dan produksi

terendah cenderung terlihat pada tahun 2018. Terlihat juga bahwa berdasarkan grafik produksi per IUPHHK, PT. Jati Dharma PI memiliki produksi kayu bulat tertinggi (jumlah batang dan volume produksi) dibandingkan IUPHHK lainnya yang aktif beroperasi di Provinsi Papua.

Namun secara akumulatif, data realisasi produksi kayu bulat yang dikumpulkan yakni dari tahun 2014 hingga 2019 dimana terlihat bahwa dari akumulasi data pertahunnya, telah terjadi fluktuasi nilai total realisasi produksi kayu bulat. Salah satu factor penurunan produksi log IUPHHK berasal dari kehadiran izin penebangan kayu skala kecil (Kopermas) dan konversi hutan oleh pemerintah kabupaten telah

memberikan tekanan yang cukup besar pada pemegang konsesi skala besar di banyak wilayah di Indonesia (Barr et al., 2006).

Secara parsial, tren data produksi tertinggi terlihat pada realisasi produksi kayu bulat tahun 2015 dengan akumulasi mencapai 680.093,50 m³ dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya. Sementara tren produksi realisasi kayu bulat terendah terlihat pada tahun 2018 dengan total akumulasi produksi mencapai 509.656,20 m³. Namun secara keseluruhan, realisasi produksi dari tahun 2014 hingga 2019 cukup bervariasi dimana tidak terlihat tren dan cenderung realisasi produksi yang terus meningkat maupun yang terus menurun dengan bertambahnya waktu.

PNBP Sektor Kehutanan di Provinsi Papua

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan melalui pemberian ijin konsesi kepada perusahaan ditujukan guna memberikan manfaat dan kemakmuran kepada negara dalam bentuk kompensasi, retribusi dan pajak sesuai peraturan teknis yang ditetapkan yang dimulai sejak tahun 1998 melalui Peraturan Pemerintah (PP) 59/1998 tentang tarif atas jenis PNPB pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Melalui PNPB kemudian terelaborasi menjadi bentuk kompensasi berupa Dana Reboisasi (DR) yang ditargetkan kepada ijin pemanfaatan konsesi pada areal hutan alam dan skema Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang merupakan salah satu bentuk pungutan intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan secara fungsional tidak terbatas pada hutan alam saja namun berlaku juga pada areal konsesi hutan tanaman.

Merujuk pada data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam Catatan Kebijakan Transparansi Penerimaan Negara Sektor Kehutanan (2013) menguraikan bahwa PNPB sektor kehutanan masih didominasi oleh sektor kayu antara lain berupa DR, PSDH, Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT). Dari keempat

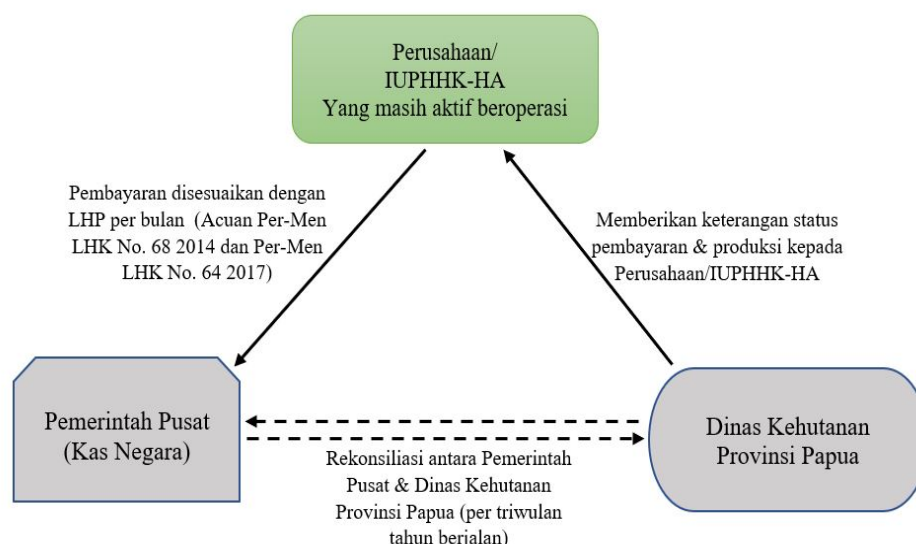
skema ini, skema DR masih memberikan kontribusi tertinggi (59,9%) terhadap PNPB yang kemudian diikuti oleh skema PSDH dengan kontribusi sekitar 26,6% (Artikel 33 Indonesia, 2014).

Dalam proses negosiasi penetapan tarif DR dan harga patokan PSDH pada dasarnya tidak akan mempengaruhi keuntungan pengusaha dari biaya produksi dan harga kayu bulat. Namun dalam menganalisis peningkatan PNPB sektor kehutanan berkorelasi terhadap besarnya kontribusi DR dan PSDH yang dikenakan (Astana & Karyono, 2014). Pungutan DR didasarkan pada kelas diameter, sedangkan PSDH pada harga patokan yang ditetapkan di TPn (untuk kayu hutan alam) dan di hutan (untuk kayu hutan tanaman).

Dalam kaitannya dengan implementasi PNPB sektor kehutanan di Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua selaku representasi penerapan kebijakan nasional di daerah Papua telah menerapkan aturan penetapan pungutan PNPB sektor kehutanan yang antara lain bersumber dari pungutan DR, PSDH dan IIUPH. Penerapan dan pengelolaan penerimaan retribusi sektor kehutanan ini juga telah dikelola secara baik dengan mekanisme kebijakan yang ada dan sejauh ini tidak terjadi masalah yang berarti dalam implementasinya (Sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pendapatan PNPB sektor kehutanan di Provinsi Papua yang didasarkan pada kegiatan konsesi dan eksploitasi sumber daya hutan sudah berjalan cukup baik.

Secara teknis alur dan mekanisme pembayaran skema DR dan PSDH yang berlaku pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua data digambarkan sebagai berikut: Perusahaan/IUPHHK-HA selaku pemegang ijin konsesi akan membayar secara langsung kepada kas negara yang mana jumlah yang terbayarkan disesuaikan dengan realisasi produksi kayu bulat

disampaikan kepada dinas melalui kegiatan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi yang dilakukan setiap triwulan.



Gambar 4. Alur mekanisme pemungutan retribusi DR dan PSDH yang berlaku selama ini di Provinsi Papua

Penerimaan DR dan PSDH di Provinsi Papua

perusahaan dengan perusahaan lainnya yang masih aktif beroperasi dengan kisaran dari Rp. 5.147.764.230,77–Rp. 211.587.680.401,08 untuk penerimaan retribusi DR dan 4.332.395.167,00–Rp. 96.774.303.390,66 untuk kontribusi PSDH. Secara akumulatif dari ke 13 perusahaan/IUPHHK-HA yang berkontribusi terhadap DR dan PSDH Provinsi Papua, terlihat PT. Jati Dharma PI memiliki kontribusi yang paling besar baik untuk kontribusi DR maupun PSDH dengan total penerimaan DR dan PSDH selama periode 2014-2019 sebesar Rp. 211.587.680.401,08 dan Rp. 96.774.303.390,66 bila dibandingkan dengan perusahaan/IUPHHK-HA lainnya di Provinsi Papua yang masih aktif beroperasi. Sementara kontribusi DR dan PSDH terkecil terlihat pada PT. Alas Tirta Kencana baik untuk nilai total akumulasi maupun rata-rata retribusi pertahunnya (Tabel 2).

Tabel 2. Deskripsi nama dan keberadaan perusahaan serta total dan rata-rata retribusi penerimaan Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Provinsi Papua dari tahun 2014 – 2019.

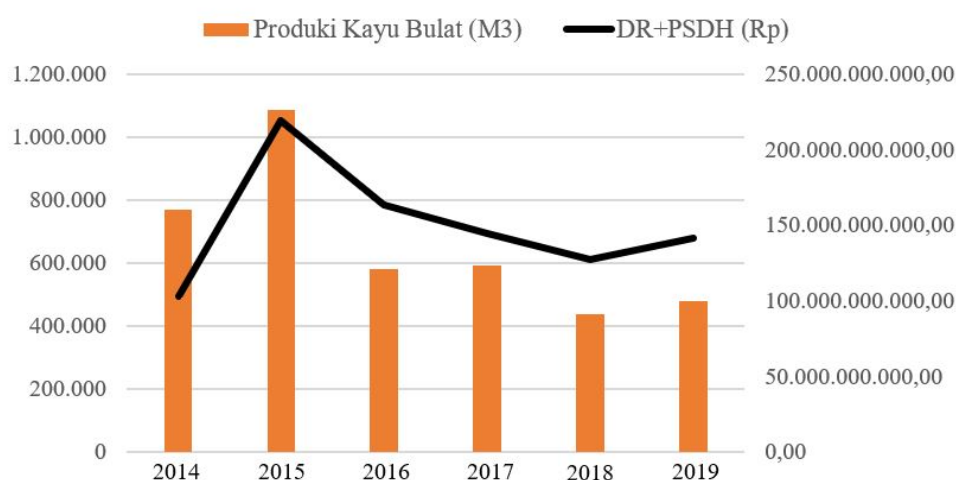
No	Nama Perusahaan/IUPHHK-HA (PT.)	Total Penerimaan (Rp)		Rata-Rata Penerimaan (Rp)	
		DR	PSDH	DR	PSDH
1.	Inocin Abadi	47.458.720.576,47	13.753.799.585,00	7.909.786.763	1.964.828.5112,14
2.	Papua Hutan Lestari Makmur*	6.889.680.447,12	5.576.913.353,00	1.722.420.112	1.394.228.338,25
3.	Jati Dharma Indah PI	211.587.680.401,08	96.774.303.390,66	35.264.613.400	16.129.050.565,11
4.	Diadyani Timber	35.382.292.012,22	26.932.687.659,92	5.897.048.669	4.488.781.276,65
5.	Alas Tirta Kencana**	5.147.764.230,77	4.332.395.167,00	1.286.941.057,69	1.083.098.791,75
6.	BBU	35.791.912.624,87	29.050.208.596,00	5.965.318.771	4.841.701.432,67
7.	WMT Unit II	56.117.940.154,41	44.626.937.585,00	9.352.990.026	7.437.822.930,83
8.	Salaki Mandiri Sejahtera	28.271.785.126,02	23.511.687.276,00	4.711.964.188	3.918.614.546,00
9.	Mondialindo Setya Pratama***	25.849.951.568,23	21.356.100.858,00	5.169.990.314	4.271.220.171,60
10.	Batasan	29.282.599.816,41	24.206.457.482,40	4.880.433.303	4.034.409.580,40
11.	Hanurata***	8.137.559.634,58	6.613.087.424,00	1.627.511.927	1.322.617.484,80
12.	TTL	81.205.897.711,57	24.595.823.183,00	13.534.316.285	4.099.303.863,83

Keterangan:

* Data DR dan PSDH tersedia dari tahun 2016 – 2019

** Data tersedia dari tahun 2014-2017

*** Data tersedia dari tahun 2015-2019



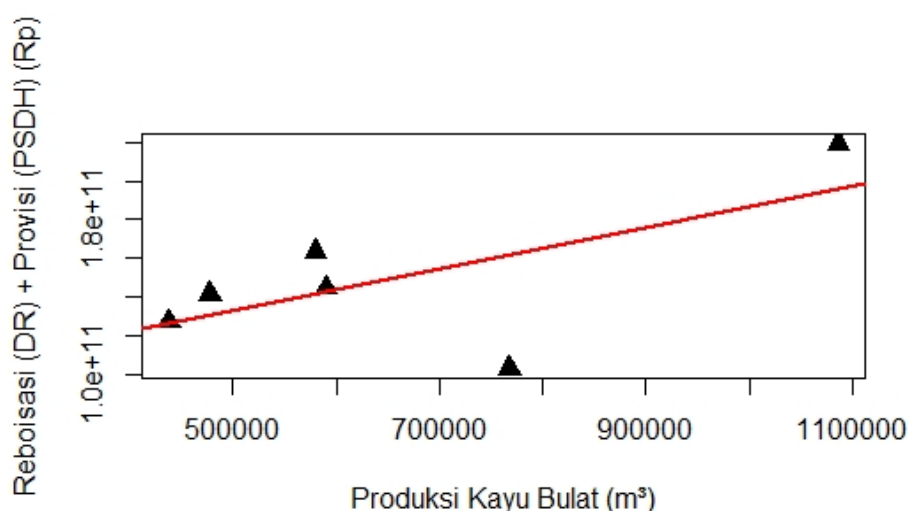
Gambar 5. Tren hubungan nilai penerimaan retribusi DR+PSDH dan produksi kayu bulat rata-rata per tahun dari tahun 2014 hingga 2019.

Dari grafik hubungan antara kontribusi penerimaan DR+PSDH dan produksi kayu bulat terlihat bahwa terdapat fluktuasi nilai baik dari penerimaan pendapatan yang cenderung tinggi pada tahun 2015 namun turun menurut pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Variasi tren

penerimaan ini juga cenderung diikuti oleh nilai total produksi tahunan dimana terlihat bahwa realisasi produksi kayu bulat tertinggi terjadi di tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya.

Hasil perhitungan regresi sederhana dengan menggunakan rumus $Y = a + bX$, dimana dengan penempatan data realisasi produksi kayu bulat (m^3) sebagai variabel terikat (*explanatory variable*) dan besaran nilai retribusi DR+PSDH sebagai variabel bebas (*predicted variable*) dari tahun 2014 – 2019 memperlihatkan nilai korelasi yang positif yaitu sebesar 0,6440 dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,4149 (Gambar 4). Nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang positif ini menggambarkan bahwa hubungan antara

realisasi produksi kayu bulat (m^3) dengan penerimaan retribusi DR+PSDH di Provinsi Papua dapat dikatakan cukup erat yang mana 41,49 persen keragaman penerimaan retribusi DR+PSDH dapat tergambarkan melalui nilai realisasi produksi kayu bulat walaupun di sisi lain terdapat 58,51 persen keragaman lainnya dipengaruhi oleh faktor di luar realisasi produksi kayu bulat. Walaupun demikian, tren positif kenaikan penerimaan retribusi yang bersumber dari DR dan PSDH cenderung terlihat tiap tahunnya (2014 hingga 2019).



Gambar 6. Tren hubungan regresi sederhana antara realisasi produksi kayu bulat terhadap penerimaan retribusi DR dan PSDH di Provinsi Papua

Kendatipun terdapat fluktuasi nilai penerimaan retribusi DR+PSDH yang diperoleh dari tahun 2014 – 2019, namun secara akumulatif rata-rata penerimaan dari tahun 2014 – 2019 terlihat tumbuh sebesar 15 persen. Nilai pertumbuhan 15 persen ini diperoleh dari rata-rata pertumbuhan selama 6 tahun (2014 - 2019) dengan menggunakan rumus persentase pertumbuhan per tahun:

$$\% \text{ Nilai Pendapatan} = \frac{\text{pendapatan akhir} - \text{pendapatan awal}}{\text{pendapatan awal}} \times 100\%$$

Teknis perhitungan yang digunakan yakni dengan mengidentifikasi pertumbuhan per tahun yang kemudian dirata-ratakan selama enam tahun (2014 - 2019) yang selanjutnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tren akumulasi pertumbuhan pendapatan dari skema DR+PSDH periode tahun 2014-2019 di Provinsi Papua

Tahun	Penerimaan DR+PSDH (Rp)	% Pertumbuhan DR+PSDH Per Tahun
2014	103.020.740.939,10	-
2015	219.418.995.367,04	112,9852
2016	163.086.536.529,16	-25,6734
2017	143.702.575.157,81	-11,8856
2018	127.158.498.585,80	-11,5127
2019	141.314.966.567,82	11,1329
Rataan pertumbuhan		15,0092 (15 persen)

Prediksi dan simulasi menjadi salah satu parameter penting yang dapat dirunut sebagai acuan ke depan terutama dalam pengelolaan sumber daya hutan di Papua. Berdasarkan asumsi pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 15 persen (periode 2014 - 2019), maka selanjutnya perlu untuk memprediksi tren pendapatan retribusi DR+PSDH di Provinsi Papua untuk enam tahun ke depan yakni di hingga tahun 2025. Hal ini penting guna menaksir besaran nilai pendapatan dengan mempertimbangkan kondisi dan faktor ikutan lainnya. Berdasarkan asumsi bahwa kondisi hingga 2025 tidak berbeda dengan kondisi sekarang (jumlah perusahaan yang sama, tidak ada perubahan regulasi yang mengikat dll.), maka dapat diprediksi dengan laju pertumbuhan tahunannya sebesar 2,5 persen maka penerimaan retribusi DR dan PSDH sehingga pada tahun 2025 akan mencapai total akumulasi penerimaan sebesar Rp. 138.551.443.145. Namun secara faktual kemungkinan perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan regulasinya akan berdampak juga terhadap produksi kayu bulat dan retribusi yang diterima negara.

Dalam konteks pendapatan dan retribusi sektor kehutanan di Provinsi Papua, tentu terdapat banyak faktor yang secara langsung maupun tidak langsung saling mempengaruhi sehingga berdampak positif maupun negatif. Secara teknis, retribusi yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya hutan di Papua berkorelasi dengan pemanfaatan dan

pemungutan hasil hutan yang dilakukan baik kayu maupun produk bukan kayu lainnya selama periode waktu tertentu. Skema penerapan PNPB sektor kehutanan di Provinsi Papua telah menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mengelola retribusi sektor kehutanan dengan mekanisme DR dan PSDH. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa implementasi pemungutan retribusi ini masih terlihat sangat berfluktuasi dengan nilai penerimaan yang tidak menentu sepanjang tahun (hubungan regresi pada Gambar 4). Menurut Djamil dkk. (2018) bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan PSDH antara lain besaran tarif PSDH, harga kayu yang dikenakan dan rata-rata akumulasi produksi kayu bulat.

Adanya perubahan peraturan teknis yang mengatur besaran harga kayu menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi fluktuasi realisasi produksi kayu bulat dan besaran penerimaan retribusi DR dan PSDH yang diterima negara dari pemanfaatan hutan di Provinsi Papua. Hadirnya perubahan Peraturan Per-Men LKH No. 68 tahun 2014 dengan Per-Men LKH No. 64 tahun 2017 yang mengatur tentang besaran harga satuan produk hutan terutama kayu terindikasi cukup signifikan dalam realisasi produksi kayu bulat di Provinsi Papua. Tren menurunnya realisasi produksi setelah diterbitkannya Per-men 64 tahun 2017 cukup bisa diterima karena faktor pendapatan perusahaan/IUPHHK-HA yang mungkin semakin tidak profitable sehingga realisasi

produk kayu bulat pada areal ijin konsesi yang diberikan menjadi tidak maksimal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren produksi kayu bulat (m^3) periode 2014 – 2019 bervariasi dimana nilai produksi tertinggi terlihat pada tahun 2015 dengan total realisasi produksi sebesar 1,163,665 m^3 . Sementara penerimaan PNBP dari periode 2014-2019 terlihat cukup tinggi pada tahun 2015. Perusahaan dengan kontribusi PNBP tertinggi terdapat pada PT. Jati Dharma PI. Hasil analisis tren regresi sederhana antara penerimaan dan produksi kayu bulat masih terlihat cukup positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15 persen. Diharapkan dari kajian ini memberikan informasi aktual terkait dampak perubahan regulasi tarif DR dan PSDH yang berpengaruh terhadap pendapatan sektor kehutanan di Papua.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada: Pemerintah Provinsi Papua, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Bapak Jan Jap L. Ormuseray, SH, M.Si yang telah mendukung pendanaan. Hal yang sama juga diucapkan terimakasih kepada para pihak yang sudah membantu selama proses penelitian serta para reviewer yang akan memeriksa tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astana, S., & Karyono, O.K. (2014). Sumber daya hutan terhadap laba pemegang konsesi hutan dan penerimaan negara bukan pajak : studi kasus hutan alam produksi di Kalimantan Timur, Indonesia (The implication of reforestation fund and forest resource provision tariff changes on profit of fo. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 1999, 251–264.
- Barr, C., Resosudarmo, I.A.P., Dermawan, A., McCarthy, J., Moeliono, M., & Setiono, B. (2006). Decentralization of forest administration in Indonesia. In C. Barr, I. A. P. Resosudarmo, A. Dermawan, J. McCarthy, M. Moeliono, & B. Setiono (Eds.), *Implications for Forest Sustainability, Economic Development and Community Livelihoods (Issue May 2021)*. Center for International Forestry Research.
- Benyamin, R., Supriambodo, B., Santoso, I., Siswono, H., David, Widyantoro, B., Soewarso, Erwansyah, Siswoko, E., Yasman, I., Rahmin, K., Purwita, T., Sugijanto, Maksum, J. (2019). *Road map pembangunan hutan produksi tahun 2019-2045*. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), https://www.rimbawan.com/files/2020/05/Road-Map-APHI-2019-2045-Mobile_compressed.pdf (Diunduh 27 Januari 2021).
- Byron, N., Arnold, J.E.M. (1997). What futures for the people of the tropical forest? CIFOR Working Paper. No. 9. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Djamil, I., Umar, S., Golar. (2018). Analisis kebijakan provisi sumberdaya hutan (PSDH), dana reboisasi (DR) dan penggantian nilai tegakan (PNT) di Provinsi Sulawesi Tengah. *Mitra Sains*, 6(1), 19-30.
- Erwinsyah, Harianto, Sinaga, B.M., Simangunsong, B.C. (2017). Analisis penawaran dan permintaan kayu bulat untuk pemenuhan kebutuhan industri kayu lapis, kayu gergajian dan pulp di Indonesia. *Sosio-E-Kons*, 9(2), 117-124.
- Fury, C. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kayu olahan di Indonesia tahun 1985-2005*. [Skripsi]. Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

- Kuswandi, R., Sadono, R., Supriyatno, N., Marsono, D. (2015). Model pengelolaan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat: Studi kasus pemilik hak ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni. *Jurnal Kehutanan Papuasia*, 1(1): 11-17.
- Prasetyo, W.A., Budiani, E.S., Arlita, T. (2017). Kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jom Faperta*, 4(1).
- Suryandari, E.Y. (2008). Analisis permintaan kayu bulat industri pengolahan kayu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 5(1), 15-26.
- Syafrani, M.H., Iskandar, R., Gani, I. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan dan dampaknya terhadap kesempatan kerja. *Jurnal Inovasi*, 13 (2), 124-134.
- Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, Y., Imburi, C., Patriahadi, Marwa. J. Yufuai, M.C. (2005). Dampak otonomi khusus di sektor kehutanan Papua. Pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam pengusahaan hutan di Kabupaten Manokwari. CIFOR.
- Ulya, A.N., dan Yunardi, S. (2006). Analisis dampak kebakaran hutan di Indonesia terhadap distribusi pendapatan masyarakat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Palembang Sumatera Selatan*, 3(2), 133-146.